

BAB V

PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Tahun 2002 lalu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan Menteri Keuangan bernomor 308/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 yang menetapkan adanya Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAPD). Komite ini bertugas menyusun suatu standar akuntansi pemerintahan yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membuat laporan keuangan. Standar ini baru ditetapkan tahun 2005 sehingga penerapan atas standar tersebut baru terlaksana di tahun 2006. Maka, tahun 2006 kemudian menjadi masa transisi bagi pemerintah pusat, daerah, dan entitas pelaporan lain di lingkup sektor publik.

Sesuai tujuan penelitian yakni melihat tingkat kepatuhan pemerintah daerah tingkat II, terlihat bahwa 76,91% Kabupaten/Kota di Indonesia telah membuat laporan keuangan dengan tingkat kepatuhan atas kelengkapan yang berbeda-beda sesuai yang disyaratkan dalam PP No.24 tahun 2005.

Untuk Laporan Realisasi Anggaran memenuhi 58,67% syarat-syarat penyusunan laporan realisasi anggaran. Untuk Neraca telah memenuhi 65,14% syarat-syarat penyusunan neraca. Untuk Laporan Arus Kas telah memenuhi 88,33% syarat-syarat penyusunan laporan arus kas. Untuk Catatan atas Laporan Keuangan telah memenuhi 52,92% syarat-syarat penyusunan catatan atas laporan keuangan. Angka ini menunjukkan prospek yang baik dalam perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Angka ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah berusaha

mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun telah membuat laporan keuangan, mutu tiap laporan keuangan yang ditunjukkan dari kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan berlaku sangat beragam.

Variasi paling beragam terjadi pada Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan karena menunjukkan rentang nilai yang besar antara nilai tertinggi dan nilai terendah hasil pengukuran. Variasi beragam ini berarti masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mengikuti standar akuntansi pemerintah saat membuat neraca periode berjalan dan tidak mengungkapkan informasi-informasi yang menjelaskan laporan keuangan disajikan wajar dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyebab yang mempengaruhi keberagaman skor pengukuran adalah sistem pengendalian intern yang berlaku dalam pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern di tiap Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik bahkan ada Kabupaten yang tidak memiliki sistem pengendalian intern.

Dari hasil pengujian hipotesis, hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan penyusunan laporan keuangan. Artinya, semakin besar pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten/Kota semakin mungkin untuk memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sementara, Total Aktiva memiliki korelasi negatif dengan tingkat kepatuhan penyusunan laporan keuangan dan tidak signifikan.

V.2 SARAN

1. Penelitian ini telah dapat memberikan informasi dan gambaran atas kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota atas standar akuntansi pemerintah dengan sample terbatas. Maka penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup

penelitian dan menggunakan sampel yang lebih banyak supaya memperoleh gambaran yang lebih umum mengenai penerapan standar.

2. Penelitian ini hanya menemukan dua variabel independen yang diindikasikan memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan. Diharapkan penelitian berikutnya hendaknya mencari variabel-variabel lain yang mungkin memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan supaya memperdalam analisa atas data. Contoh variabel yang mungkin dimasukkan antara lain, tingkat pendidikan pegawai pemerintahan, latar belakang pendidikan pegawai pemerintahan, atau sistem akuntansi yang berlaku dalam pemerintahan tersebut.
3. Penelitian ini bersifat baru di Indonesia sehingga penulis kesulitan untuk memperoleh dasar teori untuk menentukan indikator laporan keuangan yang berkualitas. Maka penelitian berikutnya diharapkan menemukan indikator-indikator yang lebih tepat untuk mengukur kualitas laporan keuangan.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengubah jenis data dari data *cross section* menjadi jenis data panel untuk pengujian hipotesis untuk melihat kemungkinan hasil pengujian berbeda jika unsur *time-series* dimasukkan.